

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saepul Bahri
NIM : 212611017
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “**KAJIAN YURIDIS USIA PERNIKAHAN DI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG**”. secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang,2023



Saepul Bahri
NIM : 212611017

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **KAJIAN YURIDIS USIA PERNIKAHAN DI
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN
PANDEGLANG**

Nama : Saepul Bahri

NIM : 212611017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 15 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Serang, 15 Agustus 2023

Direktur,



Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A.
NIP. 19610829199003100

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER

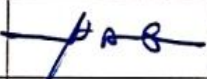


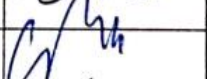
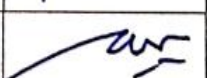

Judul Tesis : **KAJIAN YURIDIS USIA PERNIKAHAN DI
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN
PANDEGLANG**

Nama : Saepul Bahri

NIM : 212611017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Diuji dan dinyatakan Lulus pada tanggal : 15 Agustus 2023

TIM PENGUJI				
No.	Jabatan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	<u>Prof. Dr. H. Nafan Torihora, M. Hum</u> NIP. 197001032003121001	25/09/2023	
2.	Sekretaris Sidang	<u>Dr. Usman Mustofa, M. Ag</u> NIP. 196606142014091201	25/09/2023	
3.	Penguji I	<u>Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M. Hum</u> NIP. 196909061996032002	05/10/2023	
4.	Penguji II	<u>Dr. H. Dede Permana, M.A</u> NIP. 197903262009011001	25/09/2023	
5.	Pembimbing I	<u>Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.SI</u> NIP. 196506071992031005	15/09/2023	
6.	Pembimbing II	<u>Dr. Usman Mustofa, M. Ag</u> NIP. 196606142014091201	25/09/2023	

NOTA DINAS PEMBIMBING UJIAN TESIS

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul "**KAJIAN YURIDIS STATUS USIA PERNIKAHAN DI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDRGLANG**" yang ditulis oleh:

Nama	: Saepul Bahri
NIM	: 212611017
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar M.H. (Magister Hukum).

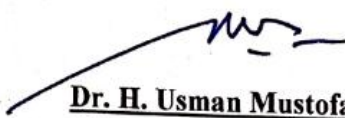
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Zaini, M.SI
NIP.196506071992031005

Serang, September 2023



Pembimbing II

Dr. H. Usman Mustofa, M.A
NIP. 196606142014091201

ABSTRAK

Pentingnya akad nikah sebagai bagian integral dalam pernikahan tidak dapat diragukan. Dalam berbagai definisi pernikahan yang dikemukakan oleh para ulama, akad nikah ditempatkan sebagai inti dari pernikahan itu sendiri. Berbeda dengan makhluk lain yang bebas hidup dan mengikuti nafsu sendiri, Tuhan menciptakan makhluk hidup di alam semesta ini, khususnya manusia. Allah menetapkan aturan-aturan bagi kehidupan manusia, termasuk bagaimana laki-laki dan perempuan harus saling memperlakukan, agar kehormatan dan martabat mereka dapat terjaga dengan baik. Pada realitasnya di wilayah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang tradisi menikah secara agama bagi calon pengantin yang masih di bawah usia 19 tahun menimbulkan berbagai problematika. Di antaranya jika menikah secara agama sudah tentu pasti tidak tercatat dan tidak akan mendapatkan buku nikah, padahal kutipan akta nikah sangatlah penting untuk, padahal ada ada persyaratan lain yang bisa di tempuh untuk bisa melengkapi administrasi persyaratan akta nikah, dengan cara mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang. Tetapi banyak nya masyarakat wilayah kecamatan pulosari mengambil jalur pintas yang di anggapnya tidak memepersulit keadaan dann keinginann masyarakat sehingga banyak menikah secara agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Kajian Yuridis Tentang Status Usia Pernikahan di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang?. 2) Bagaimana pelaksanaan batas usia menikah di KUA Kecamatan kecamatan Pulosari?. 3) Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kalangan masyarakat Kecamatan Pulosari?.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana Kajian Yuridis Tentang Status Usia Pernikahan di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang. 2) Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan batas usia menikah di KUA Kecamatan kecamatan Pulosari. 3) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kalangan masyarakat Kecamatan Pulosari.

Metode dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kajian Yuridis Tentang Status Usia Pernikahan di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang adalah masih difungsikannya ketentuan fikih sebagai batas usia menikah, yaitu balighnya seseorang, hal tersebut dipengaruhi oleh peran para tokoh agama yang ketika menyampaikan materi batas - usia menikah bagi calon pengantin yang dipakai sebagai sumber materinya adalah kitab-kitab fikih, karena keberadaan fikih lebih dahulu dibandingkan dengan undang-undang. 2) Pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pulosari telah dilaksanakan dengan baik yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai salah satu dasar dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat calon pengantin. 3) Pelaksanaan pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kalangan masyarakat Kecamatan Pulosari Pemahaman terhadap hak anak yang masih rendah, mayoritas orang tua di Kecamatan Pulosari memahami hak anak yang wajib ditunaikan hanyalah sebatas hak memberi sandang, pangan dan papan semata, belum menyadari adanya hak anak di bidang pendidikan.

Kata kunci: kajian yuridis, status usia pernikahan, undang-undang perkawinan

ABSTRACT

The importance of this vow as an integral part in marriage cannot be doubted. In the various definitions of marriage that were put forward by the in-laws, this vow is placed as the core of the marriage itself. Different from other divine beings who are free to live and follow their own passions, God created living beings in this universe, especially humans. God has established rules for human life, including how men and women must treat each other, so that their honor and dignity can be properly maintained. In reality, in the Pulosari sub-district, Pandeglang regency, the tradition of being married religiously and for the bride and groom who are still under the age of 19 years causes various problems. Among them, if you are married or religiously, of course you will not be registered and you will not get this mother, i.e., even though following this certificate is very important. even though there are other requirements that you can fulfill in order to complete the administration of the requirements of this certificate, i. gamma Pandeglang Regency, but a lot of people in the area poulosari sub-district take shortcuts that i don't think it's difficult because of the situation and the people's wishes so that a lot of people are married according to religion.

The formulation of the problem in this research is: 1) What is the view of the community in Pulosari District regarding the age limit for marriage which is regulated in Law Number 116 of 12019? 2) How is the implementation of the age limit for marriage in the KUA, Pulosari sub-district? 3) How is the implementation of Law Number 16 of 2019 among the people of Pulosari District?.

The objectives of this study are: 1) To find out the views of the community in Pulosari District regarding the age limit for marriage which is regulated in Law Number 116 of 2019. 2) To find out how the implementation of the age limit for marriage in the KUA, Pulosari sub-district. 3) To find out how Law Number 16 of 2019 is implemented among the people of Pulosari District.

The method in this research uses qualitative methods with a sociological juridical approach. And this type of research is descriptive analytical. Data collection techniques used by observation, interviews and documentation.

The results of this study are 1) The view of the community in the iPulosari sub-district regarding the age limit of marriage is that it is still functioned by the provisions of ifikh i as the limit of age of marriage, i.e. someone's age limit, this is influenced by the role of in-laws in religious figures iyang when conveying the subject matter of the age of immarriage for the bride and groom's candidates I is used as an immaterial source, i.e. books of Islamic jurisprudence, because the existence of Islamic jurisprudence preceded that of laws. 2). 3) Implementation of restrictions on the age of marriage according to Law No. before I am aware of the existence of children in the field of education.

Keywords: community yuridis, age of marriage status, marriage law

ملخص البحث

لا شك في أهمية هذا النذر كجزء لا يتجزأ من الزواج. في التعاريف المختلفة للزواج التي طرحها الأصهار ، يتم وضع هذا العهد باعتباره جوهر الزواج نفسه. على عكس الكائنات الإلهية الأخرى التي لها الحرية في العيش واتباع أهواءها ، خلق الله كائنات حية في هذا الكون ، وخاصة البشر. يضع الله قواعد لحياة الإنسان ، بما في ذلك كيف يجب على الرجال والنساء معاملة بعضهم البعض ، حتى يمكن الحفاظ على كرامتهم وكرامتهم بشكل ، تسبب تقليد الزواج دينياً من *Pulosari, Pandeglang Regency* صحيح. في الواقع ، في منطقة عرائس محتملات ما زلن دون سن 19 في مشاكل مختلفة. أولاً: من بينها ، إذا كنت متزوجة أو دينياً ، فلن تكون مسجلاً بالطبع ولن تحصل على هذه الأم ، أي على الرغم من أن اتباع هذه الشهادة مهم جداً ، على الرغم من وجود متطلبات أخرى يمكنك الوفاء بها من أجل لاستكمال إدارة متطلبات هذه الشهادة ، أي كيفية التقدم ، ومع ذلك ، اتخذ العديد *Pandeglang Regency* بطلب للحصول على إعفاء إلى المحكمة الدينية في الفرعية طرق مختصرة لا يعتقدون أنها صعبة بسبب الظروف و رغبات *Poulosari* من الأشخاص في منطقة الناس ، فالكثير من الناس يتزوجون دينياً

إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي: (1) ما هو رأي أهالي منطقة بولوساري بشأن الحد الأدنى لسن *KUA* الزواج المنصوص عليه في القانون رقم 16 لسنة 2019؟ (2) كيف يتم تطبيق الحد الأدنى لسن الزواج في ، ناحية بولوساري؟ (3) كيف يتم تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2019 على أهالي منطقة بولوساري؟

أهداف هذه الدراسة هي: (1) التعرف على آراء المجتمع المحلي في منطقة بولوساري فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج والذي ينظمه القانون رقم 16 لعام 2019. (2) معرفة كيفية تنفيذ الحد الأدنى لسن الزواج في الفرعية. (3) معرفة كيفية تطبيق القانون رقم 16 لعام 2019 بين سكان منطقة *Pulosari* ، منطقة *KUA* بولوساري

يستخدم المنهج في هذا البحث الأساليب النوعية مع منهج اجتماعي قانوني. وهذا النوع من البحث ووصفي تحليلي. تقنيات جمع البيانات المستخدمة في المراقبة والمقابلات والتوثيق

نتائج هذه الدراسة هي (1) وجهة نظر المجتمع في منطقة بولوساري فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج هي وظيفة الأحكام الفقهية كحد أقصى لسن الزواج ، أي حد عمر الشخص. من الفقه الإسلامي ، لأن وجود الفقه الإسلامي سبق وجود الشرائع (2). (3) تطبيق قيود سن الزواج حسب القانون رقم قبل أن أعني وجود أطفال في مجال التعليم

الكلمات المفتاحية: آراء المجتمع ، سن حالة الزواج ، وقانون الزواج

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, Puji dan rasa syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan Salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

Tesis ini berjudul “ **KAJIAN YURIDIS STATUS USIA PERNIKAHAN DI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDRGLANG**”. Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridha Allah *Subhanahu wa ta'ala*, serta bantuan moril dan nonmoril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A. Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M,Si. Pembimbing I dan Bapak Dr. Usman, M.A, Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta teman-teman mahasiswa seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, ang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini. semoga menjadi amal ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah *Subhanahu wata'ala*.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan kecuali milik sang *Khaliq*, masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang *konstruktif* untuk perbaikan dikemudian hari. Mudah-mudahan karya tulis ini bermanfaat untuk kita semua. Amiin.

Serang,

Saepul Bahri

NIM: 212611017

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
PENGESAHAN UJIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING UJIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Batasan Penelitian	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Pemikiran	13
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Kebaharuan Penelitian.....	23
I. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teori.....	23
J. Metode Penelitian.....	33
K. Sistematika Penelitian	37

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan.....	39
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	40
C. Tinjauan Batas Usia Pernikahan Menurut Ulama Klasik Dan Fikih	45
D. Tinjauan Batas Usia Kawin Menurut Hukum Fositif	48
E. Pengertian Dispensasi Kawin	50
F. Ketentuan dan Syarat Dispensasi Kawin	51
G. Definisi Usia Menikah Menurut Hukum Islam	55
H. Definisi Usia Menikah Menurut Hukum Positif	65
I. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif..	73
1. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam	73
2. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Positif.....	78
J. Definisi Usia Menikah Sebagai Syarat Pencatatan Pernikahan di Indonesia	83

BAB III GAMBARAN UMUM PENCATATAN NIKAH DI KUA KECAMATAN PULOSARI

A. Kondisi Objektif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulosari	87
B. Letak Geografis	88
C. Kehidupan Beragama	90
D. Profil KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang	98
E. Tugas Dan Pelayanan KUA Kecamatan Pulosari	100
F. Kultur Masyarakat Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang....	108
G. Peristiwa Pernikahan di KUA Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang	111

BAB IV KAJIAN YURIDIS STATUS USIA PERNIKAHAN DI

KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDRGLANG

- A. Kajian Yuridis Tentang Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Pulosari..... 118
- B. Pelaksanaan Batas Usia Menikah di KUA Kecamatan Pulosari 137
- C. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kalangan Masyarakat Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang 141

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 157
- B. Saran 158

DAFTAR PUSTAKA 160

LAMPIRAN